
Darwawan Buamona

Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: Uvrimsrykddm@yahoo.co.id

Ulung Pribadi

Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: ulungpribadi@gmail.com

<http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2014.0041>

Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Kawasan Khusus Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Tahun 2014

ABSTRACT

Natural resources and biodiversity Indonesia make this country rich with potential that exists in it, the main challenge is how to both the way the government manages the resources and can be functioned as it should be for the State and the Regions. Through the Regional Autonomy in Regions expected to be more independent in determining the whole the activity as a subordinate of the Unitary Republic of Indonesia, Sula Islands Regional Government also has the same legitimacy to make various policies, including in the field of tourism. Sula Islands Government has set as part of the development of tourism and economic make-Based Tourism Policy development to support the development of tourism. Sulabesi island Sula Islands has five locations coastal tourist potential to be developed as a regional destination tour namely Wai ipa of beach, Pagama Island, Coastal Fatkauyon, Goyofa Wai of beach, and pas ipa of beach. Tourism Regions Island Beach Sulabesi have a characteristic of a typical and natural. But not yet supported by facilities and infrastructure, including tourist facilities are good and decent for tourists. This research was conducted using qualitative research methods with fenomenologi approach to describe, analyze and interpret the sides of policies such as participation, networking, Organizational Structure, actor, financial, facilities, social, cultural, economic and political as well as the interests of stakeholders. The results showed that the availability of resources have not been allocated to support the implementation of clear, communication and coordination has not run optimally, external conditions (social, economic, and political) impede the implementation of special regional development policy implementation in Sula Islands tourism effectively and optimally. The implication is activity-based tourism economy has not contributed optimally to the government, private and community from an economic standpoint.

Keywords: Implementation Development of Policy Special Tourist Zone

ABSTRAK

Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati Indonesia membuat negeri ini kaya dengan potensi yang ada di dalamnya, tantangan utamanya adalah bagaimana cara pemerintah mengelola sumberdaya tersebut dan dapat di fungsikan sebagaimana mestinya bagi Negara maupun Daerah. Melalui Otonomi Daerah di harapkan Daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya sebagai subordinat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula juga memiliki legitimasi yang sama untuk membuat berbagai kebijakan termasuk di bidang pariwisata. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula telah menetapkan pariwisata sebagai bagian dari pembangunan dan membuat Kebijakan Pariwisata Berbasis ekonomi pembangunan untuk mendukung pengembangan pariwisata. Pulau Sulabesi Kabupaten Kepulauan Sula memiliki lima lokasi wisata pantai yang potensial untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata yaitu Pantai Wai Ipa, Pulau Pagama, Pantai Fatkauyon, Pantai Wai Goyofa, dan Pantai Pas Ipa. Kawasan Wisata Pantai di Pulau Sulabesi memiliki karakteristik yang khas dan alami. Namun belum didukung dengan sarana dan prasarana pendukungnya termasuk fasilitas wisata yang baik dan layak bagi para wisatawan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi

untuk menggambarkan, menganalisis dan menginterpretasikan sisi-sisi kebijakan seperti Partisipasi, Jejaring, Struktur Keorganisasian, aktor, finansial, fasilitas, kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik serta kepentingan stakeholder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya pendukung implementasi belum dialokasikan dengan jelas, komunikasi dan koordinasi belum berjalan optimal, kondisi eksternal (sosial, ekonomi, dan politik) menghambat implementasi pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan khusus pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula secara efektif dan optimal. Implikasinya adalah aktivitas pariwisata berbasis ekonomi belum berkontribusi secara optimal bagi pemerintah, swasta dan masyarakat dari sisi ekonomi.

Kata Kunci: Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Kawasan Khusus Pariwisata.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang belum dikembangkan secara maksimal, termasuk di dalamnya sektor pariwisata. Untuk lebih memantapkan pertumbuhan sektor pariwisata dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan, sehingga perlu diupayakan pengembangan produk-produk yang mempunyai keterkaitan dengan sektor pariwisata. Pengembangan kepariwisataan berkaitan erat dengan pelestarian nilai-nilai kepribadian dan pengembangan budaya bangsa, dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Pemanfaatan disini bukan berarti merubah secara total, tetapi lebih berarti mengelola, memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang ada, dimana potensi tersebut dirangkaikan menjadi satu daya tarik wisata. Tri Rizkal Warang dkk (2015:133)

Menurut (Widjaja 2011), Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa di lepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai Daerah Otonom, Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban masyarakat.

Wisata pantai di Pulau Sulabesi memiliki potensi wisata akan tetapi belum di kelola dengan baik atau dengan belum memiliki sarana fasilitas pengunjung yang cukup. Objek wisata pantai di Pulau Sulabesi memiliki keindahan sendiri sendiri sehingga dapat menarik daya tarik pengunjung, baik pengunjung lokal maupun pengunjung non lokal. Lokasi potensi wisata pantai yang berada di Pulau Sulabesi

di antaranya, Pantai Wai Ipa di Kecamatan Sanana, Pantai Pulau Pagama, di Kecamatan Sanana Utara, Pantai Manaf di Kecamatan Sulabesi Timur, Pantai Fatkauyon di Kecamatan Sulabesi Timur, Pantai Wai Goyofa di Kecamatan Sulabesi Timur. Tri Rizkal Warang dkk (2015:134)

Dari penjelasan di atas, salah satu sektor yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pengembangannya adalah sektor pariwisata yang memiliki potensi sesuai dengan kondisi yang dimiliki. Pengembangan sektor pariwisata tidak terlepas dari ketersediaan objek wisata yang merupakan daya tarik dalam mendatangkan wisatawan untuk melakukan kunjungan wisata. Ketersediaan objek wisata tidak terlepas dari lingkungan merupakan modal dasar pariwisata dan membentuk serta mempengaruhi lingkungan.

Berikut ini adalah wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula Kota Sanana, wisata sejarah dan Wisata alam dengan jenis - jenis wisata lainnya di antaranya. Benteng Dever Watching, Benteng ini berdiri sekitar tahun 1858 dengan luas 2750 M2 yang dibangun oleh Bangsa Belanda yang bernama Victor Moll benteng ini masih berdiri kokoh berlokasi dipusat kota pelayanan Kabupaten Kepulauan Sula (Sanana). Benteng ini juga sering dikunjungi wisatawan asing dan domestik sebagai wisata sejarah dan penelitian sejarah

Air Terjun Wailau, Panorama Alam ini terdapat didesa Wailau obyek wisata air terjun ini ditempuh dengan berjalan kaki berkisar 40 menit melintasi hutan perkebunan masyarakat setempat. Air terjun ini tinggi kurang lebih 30 meter dengan kontur bertingkat-tingkat, berair yang jernih cocok dijadikan wisata traveling sambil menikmati panorama hutan dan perkebunan disekelilingnya

Disamping memiliki Alam yang indah baik itu Wisata Pantai, Alam serta panorama bawah laut Kabupaten Kepulauan Sula Juga memiliki kerajinan Khas daerah antara lain kerajinan Anyaman Bambu dan Kain Tenun yang bisa digunakan sebagai sofenir bagi wisatawan yang berkunjung. Kerajinan tersebut berupa hiasan

496 dinding, tempat lampu, tempat Tisu, kain songket dan Tikar dll, yang kesemuanya dikerjakan oleh tangan-tangan telampil masyarakat kabupaten kepulauan sula

Alat Musik tradisional ini biasanya digunakan untuk Mengiringi Tarian-tarian Adat Khas Daerah Kepulauan Sula dalam acara adat, Pernikahan dan acara penjemputan serta pelapasan tamu kehormatan, alat musik ini terdiri dari Tifa kecil dan Besar, suling Bambu, Fiola, Gong dll dengan memiliki nada khas masing-masing yang dijadikan satu berbentuk musik tradisional. Keberadaan kawasan pariwisata ini akan kurang berdaya guna apabila Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula sebagai pihak pengelola tidak berupaya untuk mengelolanya dengan baik. Oleh karena itulah, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengembangan kawasan wisata sehingga pada akhirnya dapat diandalkan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Sula.

KERANGKA TEORI

KONSEP KEBIJAKAN

Istilah kebijakan adalah di sepadankan dengan kata *policy* kata yang di bedakan dengan kebijaksanaan (*wisdam*) maupun kebijakan (*Virtues*). Budi dan Sholichin Abdul wahab dalam Suharno (2013:2-3) sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering di pertukarkarkan seperti istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program keputusan undang undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan Grand design. Bagi para *policy makers* (pembuat kebijakan) dan orang orang yang mengikuti kebijakan, dan penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menimbulkan masalah tetapi bagi orang di luar struktur pengam, bilan kebijakan tersebut.

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau devenisi mengenai apa yang di maksud dengan kebijakan (*policy*). Setiap devenisi tersebut memberikan penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karna setiap ahli mempunyai latar belakang yang berbed-

beda pula. Menurut Carl Fredrich, dalam Suharno (2013:4) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan saran yang di inginkan.

TAHAP PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN.

Dalam tahap ini ada 3 kegiatan yang perlu di laksanakan. Suharsono (2013:24)

- a. Membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar di anggap sebagai masalah. Hal ini penting karena bisa suatu gejala yang oleh sekelompok masyarakat tertentu di anggap sebagai masalah tetapi oleh kelompok masyarakat yang lainnya atau bahkan oleh para elite politik buakan di anggap sebagai suatu masalah.
- b. Membuat batasan masalah.tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi, sehinga perlu di lakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut.
- c. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.

Memobilisasi dukungan ini dapat di lakukan dengan cara mengorganisasi kelompok kelompok yang ada dalam masyarakat dan kekuatan-kekuatan polotik, publikasi melaluimedia massa dan sebagainya.

TAHAP FORMULASI DAN LEGITIMASI KEGIATAN

Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan kebijakan, membangundukung dan melakukan negosiasi, sehingga sampai

498 pada sebuah kebijakan yang di pilih. Suharsono (2013:24).

TAHAP IMPLEMENTASI KEGIATAN

Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumber daya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme intensif dan sanksi agar agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Suharsono (2013:24)

TAHAP EVALUASI IMPLEMENTASI, KINERJA DAN DAMPAK KEBIJAKAN

Tindakan (implementasi) kebijakan akan di hasilkan kinerja dan dampak kebijakan yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil. Suharsono (2013:25)

KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

KEK adalah kawasan tertentu dalam wilayah NKRI yang menyelenggarakan fungsi prekonomian dengan fasilitas tertentu (UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK) antara lain kepabeanan, perpajakan, dan infrastruktur. KEK menjalankan fungsi ekonomi di bidang perdagangan, jasa, industri pertambangan dan energi, transportasi, maritim, dan perikanan, pariwisata, dan bidang bidang lainnya. KEK di siapkan pada kawasan yang memiliki geoekonomi dan geostrategi, dan berfungsi menampung kegiatan ekspor impor, dan memiliki daya saing internasional, perkembangan KEK adalah salah satu strategi untuk mendorong ekspor, sekaligus penciptaan lapangan kerja. Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri (2012:214)

KAWASAN AGROPOLITAN DAN EKOWISATA.

Agropolitan, minapolitan dan ekowisata adalah program

pembangunan wilayah berlandaskan krater kesisteman pembangunan wilayah yang berangkat dari *leading sector* pertanian, perikanan kelautan dan ekowisata. Dalam banyak hal ketiganya memiliki krakter serupa dalam hal pengembangan. Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri (2012:216)

Menurut UU 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai system produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang di tunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Iwan Nugroho dan Rokhmin (2012:216)

Wilayah ekowisata adalah wilayah pengembangan wisata yang berbasis nilai nilai budaya lokal dan konservasi lingkungan yang dengan misi utama pembardayaan ekonomi penduduk local. Basis wilayah ekowisata adalah pada wilayah taman nasioanal (TN) atau wilayah lain yang sesuai dengan ketentuan ekowisata. Taman nasional adalah salah satu kategori dalam kawasan konservasi mentri kehutanan telah menetapkan 50 taman nasional dalam beragam ekosistem, yakni darat laut dan pesisir. Kelembagaan TN merupakan komponen penting dalam pengelolaan kawasan konservasi, serta upaya konservasi keanekaragaman hayati dalam skala nasional maupun internasional (Rothberng, 1999) penduduk lokal di sekitar wilayah TN dapat mengembangkan potensi jasa ekowisatasekaligus ikut berupaya memlihara fungsi lingkungan. Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri (2012:217).

KONSEP PARIWISATA

Di Indonesia istilah pariwisata baru di mulai pada awal 1960-an istilah parriwisata terlahir dari bahasa sanskerta yang komponen-komponenya terdiri dari:

Pari - Penuh, lengkap, berkeliling

Wis (man) - Rumah, properti, kampung, komunitas

Ata - Pergi terus-menerus, mengembara (*roaming about*)

Yang bila di rangkai menjadi satu kata melahirkan istilah pariwisata, berarti: pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus menerus-menerus. Dalam operasionalnya istilah pariwisata sebagai pengganti istilah “*tourism*” atau “*travel*” di beri makna oleh pemerintah Indonesia mereka yang meninggalkan rumah untuk mengadakan perjalanan tanpa mencari nafkah di tempat-tempat yang di kunjungi sambil menikmati kunjungan mereka. Di Indonesia, pariwisata telah menampilkan perannya dengan dengan nyata dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan budaya bangsa. Kesempatan kerja bagi bagi orang orang trampil di bidang ini makin bertambah jumlahnya, pendapatan Negara dari pajak dan devisa makin bertambah, keadaan sosial masyarakat yang terlibat dalam sektor ini makin baik. Nyoman S. Pendit (2002:1-4)

DEFINISI PARIWISATA.

Guyer-Freuler dalam Nyoman S. Pendit (2002:34) merumuskan pariwisata sebagai berikut; Pariwisata dalam arti modern adalah merupakan gejala zaman sekarang yang di dasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilayan yand sadar dan menempuh terhadap keindahan alam kesenangan dan kenikmatan alam semesta, dan pada khususnya di sebabkan oleh bertambahnya pergulatan berbagai bangsa dan kelas dalam masyarakat sebagai hasil perkembangan perniagaan, industri dan perdagangan serta penyempurnaan alat alat pengangkutan.

Berbagai tinjauan serta peneliti menyimpulkan bahwa kepariwisataan dalam bentuk industri lainnya di dalam suatu Negara, melainkan ia merupakan satu industri yang berdiri sendiri yang pada hakikatnya membantu serta melengkapi percepatan pertumbuhan industri-indutri lainnya.

TUJUAN PEMBAGUNAN PARIWISATA DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA

501

Tujuan pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Sula di masa depan disusun dengan memperhatikan visi, misi penataan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sula untuk rentang waktu beberapa tahun kedepan sesuai dengan agenda pembangunan. Dengan memperhatikan hal tersebut maka tujuan pengembangan tata ruang wilayah kabupaten kepulauan sula yang ingin dicapai adalah:

“Mengembangkan Kabupaten Kepulauan Sula Sebagai Pusat Kegiatan Pariwisata Nasional Yang Berbasis Pada Sektor Unggulan Jasa Perdagangan, Pendidikan, Pariwisata Yang Bercirikan Pesisir Dan Kepulauan”.

MANFAAT PARIWISATA

Pendit Nyoman Suwandi (2002) pariwisata sebagai industri tidak mengambil kedudukan industri lain bahkan saling mengisi. Perluasan pemasaran hasil produk/usaha atau kegiatan lain serta perluasan lapangan kerja- dampak terhadap pendapatan nasional. (dari pengeluaran wisatan untuk sewa akomodasi makan minum pembelian barang barang buaya tamasya dan hiburan ongkos transportasi) sumbangan indusri pariwisata terhadap pendapatan nasional dengan mempergunakan multiplier effect - hasil pajak berganda - efek terhadap neraca pembayaran.

Perlengkapan dan produk pariwisata terbagi dalam katagori perusahaan utama yang lansung dan skunder - Maya alat + perlengkapan industri (swasta, pemerintah atau patungan) kebijakan (*policy*) dalam industri, pengangkutan, keuangan, perdagangan, kebudayaan, social, luar negeri, dalam negeri dan sebagainya. Pendit Nyoman Suwandi (2002)

Faktor-faktor lain yang berkaitan pariwisata adalah pertumbuhan pendapatan riil, tersedianya anggaran bagi masa libur/cuti karyawan

502 atau eksekutif, peraturan devisa/ nilai tukar uang antara Negara yang menerima dan negara asal Wisatawan. Bagi wisatawan domestik di bandingkan wisatawan Internasional kebutuhan atraksi dan pengadaannya, kebijakan angkutan udara, izin dan harga tiket pemesanan dan promosi dalam dan laur negri - model atau zamannya atraksi di DTW serta sikap masyarakat setempat terhadap wisatawan. Pendit Nyoman Suwandi (2002)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif Kualitatif. Sehingga dapat di gambarkan secara sistematis mengenai suatu keadaan, situasi, dan fenomena, tentang pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan khusus pariwisata dan factor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut di Kabupaten Kepulauan Sula.

“Penelitian Kualitatif bertujuan memperoleh mengumpulkan data pada suatu latar ilmiah dan di lakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah. (David Wiliams 1995) dalam Moleong (2014: 5)

(Denzin dan Linclon 1987) dalam Moleong (2014:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di lakukan di lakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong:5) dari penegertian ini para penulis masih tetap memprsoalkan latar alamiah denagn maksud agar hasilnya dapat di gunakan untuk menafsirkan fenomena yang di manfaatkan untuk penelitian kualitatif dalah berbagai macam metode penelitian.

Kirk dan Miller (1986:6) dalam Moleong (2014:4) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Adapun lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah Kabupaten

Kepulauan Sula. Kota Sanana. Kecamatan Sanana. Dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan lahan pembangunan pariwisata. Adapun teknik pengumpulan data dan informasi dalam menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara.
2. Teknik Dokumentasi
3. Teknik Kepustakaan

Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai. Moleong (2014:159)

Berdasarkan permasalahan pada pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan kegiatannya yaitu menyusun unit analisisnya pada pihak-pihak terkait dan relevan dengan pembahasan yang cepat untuk di jadikan sumber data. Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tahapan analisa data menurut (Moleong 2014), adalah sebagai berikut “Pertama dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, Kedua reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Ketiga, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian di kategorisasikan. Sedangkan langkah yang keempat adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data”. (Moleong 1998:190)

Untuk memperoleh analisis data yang valid, maka peneliti juga akan melakukan evaluasi. Dalam hal ini evaluasi dilakukan dengan cross cek jawaban dari setiap narasumber dengan nara sumber lain, ataupun dengan fakta dilapangan. evaluasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding

504 terhadap data itu (Moleong 1998:178)

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Kawasan Khusus Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Meningkatkan Pembangunan Wilayah Pariwisata Daerah

Penelitian yang di lakukan di Kabupaten Kepulauan Sula tepat pada lima lokasi wisata pantai yang potensial untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Pasal 2. (1)Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula periode 2005 - 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Kepulauan Sula. (2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 3.RPJP Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2005-2025 mengacu Kepada RPJPD Propinsi Maluku Utara dan RPJP Nasional yang dijabarkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Wilayah yang di jadikan sebagai wilayah wisata yaitu, Pantai Wai Ipa,, Pantai Fatkauyon, Pantai Wai Goiyofa, pantai Pas Ipa dan Pulau Pagama. Kawasan Wisata Pantai di Pulau Sulabesi memiliki karakteristik yang khas dilihat dari potensi dan atraksi alamnya. Namun belum di dukung dengan sarana dan prasarana pendukungnya termasuk fasilitas wisata yang representatif bagi para wisatawan.

Berikut ini adalah wilayah wilayah pembangunan kawasan wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula.

PANTAI WAIIPA

Objek Wisata Pantai Waiipa memiliki potensi wisata pantai, jenis pantai merupan krikil laut. Lokasi ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat / Dua dengan jarak tempuh ± 15 Menit dari Kota Kabupaten (sanana). Pantai ini terletak dipusat Kota Sanana yang memiliki panorama alam dengan karakteristik pantai berpasir

hitam dan bebatuan. Sangat cocok dijadikan tempat rekreasi keluarga pada musim liburan atau hari-hari tertentu. Pantai ini memiliki suasana laut yang cukup tenang pada musim tertentu dan juga dapat dijadikan Sarana Olah Raga Sky Air dimusim tertentu. Sarana dan prasarana yang sudah tersedia berupa Café, dan Gazebo Tradisional

505

PULAU PAGAMA

Terletak di sebelah timur pulau Mangole yang diapait oleh beberapa gugus pulau kecil. Antara Pulau Mangoli dan Pulau Lifmatola. Pulau Pagama memiliki panorama pantai pasir putih yg sangat indah. Disepanjang pantai pulau pagama terdapat pohon pinus yang tumbuh di pulau dengan luas 450 meter persegi, disamping memiliki panorama bawah laut yang tidak kalah potensinya dengan wilayah lain. Dengan kontur bawah laut berbentuk sloping dan dasar perairan terdiri dari karang keras dan halus dengan kondisi yang masih sangat baik dan indah juga memiliki kecerahan air tinggi mencapai 30 Meter. Penyelaman dapat dilakukan pada beberapa titik kordinat diantaranya penyelaman pada titik kordinat: 01.83310nLS, 126.33775 BT dan 01.82374 LS, 12634470 BT. Biota laut yang ditemui berupa beberapa jenis ikan hias yang memiliki warna yang sangat indah, gerombolan ikan sedang, Moluska, Lobster dan beberapa Tumbuhan Laut. Lokasi dapat di capai dengan menggunakan speed boat dengan jarak tempup 1 Jam dari ibu kota Kabupaten.

KAMPUNG PAS IPA

Desa Pas Ipa yang berada di Pulau Pas Ipa, yang terletak di sebelah barat pulau Mangoli bagian selatan sekitar 5 km dari selat Capalulu. Pulau Pas Ipa apabila dipandang dari arah utara tampak seperti Buaya, Pulau ini dikelilingi oleh 90 % Reef yang terdiri dari coral dan padang lamun serta bibir pantainya dikelilingi Hutan Mangrove dan sebagian pasir putih. Penyelaman di muka kampung Pas Ipa

dilakukan pada titik koordinat 01 52.939 LS dan 125 22.538 BT. Pada titik ini profil dasar perairannya didominasi oleh hard coral dan soft coral seperti Horn Coral dan biota laut yang ditemukan disini yaitu Ghost Pipe Fish dan Parot Fish. Penyelaman pada titik ini berada pada kedalaman laut 10 - 13 meter, dengan jarak pandang 15 meter, kekuatan arus lemah. Untuk dapat menyelam di muka kampung Pas Ipa dilakukan pada musim apa saja karena titik ini terhalang oleh pulau Pas Ipa yang berada didalam teluk sehingga kondisi perairannya sangat aman. Untuk sampai ke Pulau Pas Ipa dengan menggunakan Sped Boad selama 2 jam dari Ibukota Kabupaten atau kapal laut dari Ternate KM. Agil Pratama 04 transit Sanana Ibukota Kabupaten selama 4 jam atau dari ibukota Kabupaten. Dari Ternate (ibukota Propinsi Maluku Utara) dapat dijangkau dengan Pesawat Udara via Bandara Udara Falabisahaya (Eks Banadara Perusahaan PT. Barito). Kemudian dari Falabisahaya perjalanan dilanjutkan ke Pas Ipa dengan menggunakan Speed Boad selama ½ jam.

Objek Wisata Pantai Pulau Pas Ipa Potensi Pantai Pasir, Pantai pasir putih yang landai sehingga oleh masyarakat setempat sering menjadikan pantai ini sebagai kawasan wisata. Pantai Pulau Pas Ipa terletak di timur Pulau Pas Ipa. Yang unik dari obyek wisata adalah sekitar 50 meter ke arah timur terdapat kolam (atol) didalam reef dengan luas sekitar 6000 M2 dengan kedalaman laut sekitar 4-5 meter. Disekitar kolam (atol) ini terdapat padang lamun yang luas yang oleh masyarakat dijadikan lokasi memancing ikan karang. Kemudian dari lokasi ini yakni hanya 500 meter kearah selatan terdapat satu spot div.

Pantai Desa Fatkauyon dan sekitarnya memiliki potensi pantai sepanjang sekitar 2, 5 km. Desa Fatkaukauyon secara Geografis berada di ujung paling selatan pulau Sulabesi yang berhadapan lansung dengan pulau Buru bagian utara (Propinsi Maluku). Lokasi ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dengan jarak

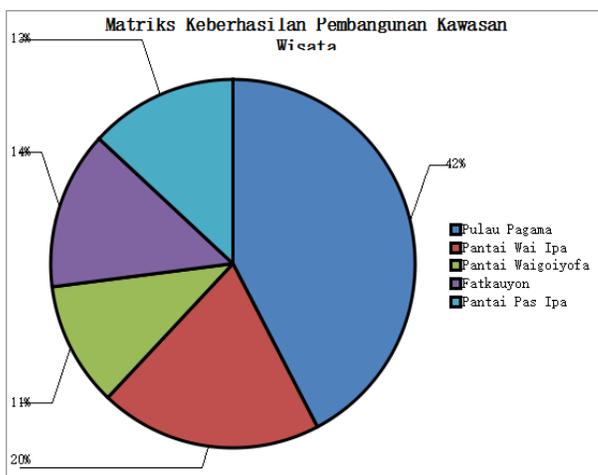
tempuh ± 2 jam t dari Kota Kabupaten (sanana). Dilakasi ini penyelaman hanya dapat dilakukan pada musim barat yaaitu pada bulan Januari, Pebruari, Maret, April dan pada bulan Okotober, Nopember, dan Desember.

PANTAI WAIGOIYOFA

Kawasan ini memiliki Potensi laut. Terletak Desa Waigoiyofa kecamatan Sulabesi Timur dengan jarak tempuh ± 1 Jam 20 Menit dari Kota Kabupaten (sanana). Pantai ini berada dalam satu teluk kecil di bagian utara Desa Wai Goiyofa. Dengan pantai yang landai dan sudah tertata ditunjang dengan panorama alam yang asli.

Dari lima lokasi yang di bangun sebagai kawas khusus pariwisata ini merupakan wilayah pesisir dan pada wilayah tersebut adalah wilayah wisata pantai adapun tingakat keberhasilan dari hasil pembangunan yang tak mencapai hasil secara seratus persen namun pembangunan dan pengembangan kawasan tersebut dapat berjalan sesuai dengan pengembangan kawasan yang ada.

Berikut adalah matriks Tingkat Keberhasilan Pembangunan Kawasan Khusus wisata.



(Sumber: Analisis Hasil Penelitian)

Dari Matriks di atas dapat dilihat tingkat keberhasilan pembangunan Kawasan wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula di lima tempat yaitu Pulau Pagama, Pantai Wai Ipa, Pantai Waigoiyofa, Fatkauyon, dan Pantai Pas Ipa. menunjukkan terjadi perbedaan pembangunan kawasan wisata. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran yang di alokasikan untuk pembangunan pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula khususnya pada lima tempat tersebut. berikut adalah tabel alokasi anggaran pembangunan kawasan wisata

TABEL 1 ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN PARIWISATA 2014.

No	Nama Lokasi Wisata	Permintaan Anggaran Pembangunan Wisata	Alokasi Anggaran
1	Pulau Pagama	Rp.490.000.000.00	Rp. 250.000.000.00
2	Pantai Wai Ipa	Rp.4.00.000.000.00	Rp. 130.000.000.00
3	Pantai Waigoiyofa	Rp.5.50.000.000.00.	Rp. 240.000.000.00
4	Pantai Fatkauyon	Rp. 2.80.000.000.00	Rp. 180.000.000.00
5	Pantai Pas Ipa	Rp. 1.95.000.000.00	Rp. 100.000.000.00

Sumber;Data Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula 2015

Dari gambar tabel di atas dapat dilihat secara langsung permintaan anggaran pembangunan kawasan wisata yang tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang di terima untuk pembangunan. Sehingga berpengaruh pada tingkat keberhasilan pembangunan Kawasan wisata dari lima kawasan di atas tersebut.

ANALISIS OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

Dalam pengkajian mengenai objek daya tarik wisata Kabupaten Kepulauan Sula dilakukan dengan pendekatan pada unsur-unsur yang menjadi potensi dan kendala setiap kelompok. Untuk memudahkan dalam menganalisis potensi dan permasalahan setiap daya tarik wisata.

Obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Sula adalah

Obyek wisata pantai dan pulau memberikan potensi alami yang berbeda-beda mulai dari **509**

1. kawasan bukit sampai pada potensi bawah air laut
2. Lingkungan dan wilayah pesisir
3. Kawasan wisata pantai yang masih alami.
4. Kawasan wisata pulau dan alam bawah laut
5. Karakteristik wilayah wisata.

Berikut adalah tabel kunjungan wisatawan di lokasi Wisata Pulau Pagama Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan umur wisatawan.

TABEL 2 UMUR PENGUNJUNG/WIASATAWAN PADA KAWASAN WISATA PULAU PAGAMA TAHUN 2014

No	Umur	Jiwa
1.	0 – 12	23
2.	13 – 23	65
3.	24- keatas	37
Jumlah		125

Sumber: Kantor Dinas Pariwisata Kab. Kepulauan Sula Tahun 2015

Dari data atas dapat di lihat bahwa pembangunan kawasan wisata belum efektif di lihat dari factor yang pertama adalah.

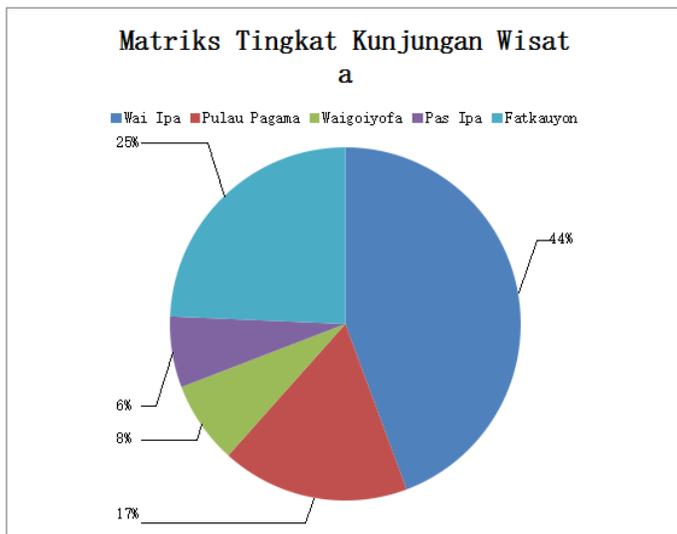
- a. Tingkat pengunjung yang msih minim.
- b. Fasilitas wisata yang belum lengkap
- c. Transportasi laut untuk wisatauan yang belum memadai

AKSESIBILITAS KAWASAN WISATA TERHADAP PENGEMBANGANNYA

Aksesibilitas merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk sampai diobyek wisata dimana aksesibilitas yang kurang memadai akan menjadi hambatan bagi pengembangan kawasan wisata. Jalan dan alat transportasi merupakan potensi yang perlu dipertimbangkan dalam suatu wilayah perencanaan karena prasarana dan sarana ini sangat penting untuk memperlancar kegiatan

510 perekonomian seperti yang terlihat pada akses yang menuju kawasan wisata kondisinya sudah baik yaitu jalan yang beraspal yang cukup memadai untuk pergi kawasan wisata yang ada di wilayah wilayah tersebut. Ini menandakan bahwa aksesibilitas menuju kawasan wisata sudah sangat mudah di jangkau. Kawasan wisata yang di bangun dapat di tempuh dengan.

1. Kendaraan, Mobil atau beroda dua
2. Speed Boat atau taupun transportasi laut lainnya.



GAMBAR: GRAFIK PERBANDINGAN POTENSI PENGEMBANGAN WISATA PANTAI
Sumber: Hasil Analisis

Dari hasil analisis, penulis mendapatkan penjelasan bahwa di antara Wisata Pantai yang ada di Pulau Sulabesi, Wisata Pantai Wai Ipa yang lebih berkembang di karnakan dapat di jangkau dengan mudah apabila dilihat dari aspek Aksesibilitasnyaapai 44% tingkat kunjungan bisa menc di bandingkan Wisata Pantai lain dengan sedangkan Kunjungan Pulau Pagama hanya berkisar 17% dan Wisata Pantai Fatkauyon yang Mencapai 24% kemudian Pantai Wai Goiyofa 8% dan yang terakhir yaitu Objek Wisata Pas yang memiliki akses yang sangat lemah 7%.

Dari hasil analisis data di atas dapat di jelaskan secara langsung, pembangunan kawasan wisata di Kabupaten Kepulauan Sula belum efektif, di lihat dari tingkat pengunjung pada kawasan- kawasan wisata tersebut yang belum mencapai target dari pembangunan. Sesuai dari data penerimaan pendatan daerah di sektor pariwisata melemah di karenakan salah satu indikator adalah efektifitas pembangunan wisata terhadap jumlah pengunjung yang belum memadai sehingga berpengaruh pada pendapatan di sektor pariwisata.

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN KHUSUS PARIWISATA UNTUK PENINGKATAN DALAM PENATAAN KAWASAN DAN TATA RUANG DAERAH

Pembangunan kawasan wisata juga di Kabupaten Kepulauan Sula juga berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang setiap Provinsi dan Kabupaten/ Kota/ Kawasan tertentu perlu untuk penataan ruang. RDTR merupakan suatu alat yang berisi kerangka dasar bagi upaya pengalokasian ruang berdasarkan fungsi, struktur dan hirarki ruang, sebagai pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruan sebagaimana telah di atur di UU penataan ruang tersebut di tindak lanjuti dengan peraturan pemerintah (PP) No 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang, yang terdiri dari kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam pembangunan kawasan wisata di Kabupaten Kepulauan Sula dengan tujuan adalah bagaimana menyeimbangkan pembangunan di setiap wilayah maupun tingkat kecamatan melalui pembangunan kawasan wisata maka wilayah akan mengalami tingkat pertumbuhan pembangunan. Sesuai permasalahan utama di Kabupaten Kepulauan Sula adalah kesenjangan pembangunan antar kecamatan. Kondisi ini menyebabkan konsentrasi penduduk dan aktifitas ekonomi hanya terpusat pada daerah yang mengalami

512 pembangunan yang cukup tinggi, misalnya kesaenjangan antar pembangunan wilayah pantai dengan wilayah pedalaman dan antara pusat pemerintah dengan wilayah pedesaan. Di samping itu berdasarkan rumusan (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sula, pembangunan infrastruktur yang meliputi transportasi, ketenagalistrikan, energy, pos, telekomunikasi, informatika, sumberdaya air, perumahan, pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan hidup mengalami kesaenjangan dalam pemerataannya, baik kuantitas maupun kualitas dapat di katakana disparitas kesejateraan antara kawasan juga dapat di identifikasi dari pembangunan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan dan permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula perlu menyusun berbagai kajian rencana wilayah yang di awali dengan penyusunan RDTR Kabupaten Kepulauan Sula yang memiliki letak dan posisi strategis. Maksud dan tujuan RDTRK ini adalah mewujudkan rencana detail tata ruang kawasan yang mendukung terciptanya kawasan srategis maupun kawasan fungsional secara aman produktif dan berkelanjutan seperti kawasan wisata dan pembangunan lainnya.

Seperti yang telah di bahas sebelumnya salah satu pendekatan dalam menentukan wilayah Daerah, dalam pendekatan ini, Daerah atau wilayah adalah suatu ruang yang di anggap merupakatuann suatu kesatuan perkembangan sosial ekonomi yang terdiri dari pusat pertumbuhan dan daerah penyangga yang merupakan inti dari pembanguanan kasawasan tersebut.

PEMBANGUNAN KAWASAN KHUSUS PARIWISATA UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Gambaran Umum Keuangan Daerah dan Pemasokan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur adalah masalah pengelolaan daerah dan anggaran daerah. Dalam upaya

pemberdayaan pemerintah daerah, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah di masa otonomi daerah dan anggaran daerah adalah:

- a) Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik, hal ini tidak saja terlihat dari besarnya porsi penganggaran untuk kepentingan publik, tetapi pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.
- b) Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah pada khususnya.
- c) Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran serta partisipasi yang terkait dengan pengelolaan anggaran seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah lainnya.
- d) Kerangka umum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar.
- e) Kejelasan aturan tentang pengeluaran operasional dan lain-lain yang tidak jelas akuntabilitasnya. Serta,
- f) Prinsip anggaran dan kejelasan larangan pengaturan alokasi anggaran diluar yang ditetapkan dalam strategi dan prioritas APBD.

Dari gambaran Ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Sula Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki potensi beraneka ragam, baik obyek wisata alam, budaya, maupun buatan yang terletak diberbagai tempat di Kabupaten Kepulauan Sula kurang di manfaatkan sehingga menjadi masalah pada sektor tersebut. Namun pada sektor pariwisata yang masih dalam proses pembangunan mampu memberikan pemasokan bagi Daerah walaupun masih dalam angka yang kecil.

No	Tahun	Pemasokan PAD
1	2012	Rp 4.500.000.00
2	2013	Rp 3.800.000.00
3	2014	Rp 5.000.000.00.

Sumber: Data Pariwisata 2015

Dari data tersebut dapat lihat perkembangan pemasokan PAD dari sektor pariwisata masih sangatlah lemah atau belum efektif. Di karnakan Pembanguan kawasan Wisata dan pemeliharaan lingkungan pariwisata belum secara afektif di kerjakan oleh sebab itu berdampak pada Pemasokan Pendapatan asli daerah (PAD).

1. Tingkat pembangunan
2. Penataan kawasan
3. Jangkauan komunikasi pada wilayah wisata.

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI INVESTASI PARIWISATA

Obyek wisata dibangun di areal yang juga masih dalam kawasan ekowisata bagian Pantai untuk mewujudkannya diperlukan penataan komponen fasilitas pariwisata dengan mengestimasi luasan masing-masing fasilitas serta estimasi biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatannya.

Dalam penentuan detail rencana investasi ini ditentukan berdasarkan rujukan pada pengelolaan obyek obyek wisata sejenis yang telah ada sebelumnya, obyek wisata pulau pagama dan pantai waigo i serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kawasan itu sendiri disamping juga dengan melakukan survei dan perbandingan terhadap obyek-obyek wisata alam buatan yang ada pada kawasan wisata.

1. KONDISI WILAYAH PESISIR
2. JARAK TRANSPORTASI KE KAWASAN WISATA
 - a. Komponen Sarana Dan Prasarana Pariwisata
Fasilitas wisata yang akan dibangun meliputi fasilitas akomodasi,

atraksi wisata tirta, wisata pantai dan sesuai nilai-nilai tata laksana. Komponen sarana prasarana pariwisata dari kawasan di Kabupaten Kepulauan Sula adalah; kafe, Jalan Lingkungan, Dermaga perahu, Fasilitas Parkir, Kios,

b. Program Pendapatan

Suatu investasi yang ditanamkan, pengembalian modalnya akan di dapatkan dari hasil pendapatan yang akan diperolehnya bila telah di operasikan kelak. Agar layak dan menguntungkan maka pendapatan ini haruslah melebihi investasi yang telah dikeluarkan setelah di ditetapkan terhadap nilai sekarang. Rencana pengoperasian obyek wisata yang ada ini akan mengandalkan pendapatan-pendapatannya dari.

1. Penjualan tiket masuk, Penjualan paket-paket wisata,
2. Penjualan makanan dan minuman, kios, Program pendapatan ini juga ditentukan berdasarkan rujukan pada pengelolaan obyek-obyek wisata sejenis yang telah ada sebelumnya,
3. paket-paket wisata yang hendak dijual disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada obyek wisata ini dengan asumsi persentase pemilihan paket-paket wisata tersebut yang diolah dari data persentase daya tarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Sula.

Berikut adalah tabel permodelan pengambilan paket wisata

TABEL 4 PERMODELAN PENGAMBILAN PAKET WISATA

Tahun	Tahun 1	Asumsi Kunjungan	
		Melanjutkan Perjalanan Ke Wisata Bawah laut	Wisata Pulau Dan Pantai
2011	1	5	8
2012	2	7	8
2013	3	6	5
2014	4	9	11
Jumlah		27	32

(Sumber: Data Pariwisata 2015)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada lokasi wisata ada beberapa paket dalam pengelolaan wisata yaitu asumsi kunjungan dalam pengambilan perjalanan wisata yaitu wisata pantai dan bawah laut sebagai tujuan wisata yang ada sesuai dengan paket yang kemudian di sediakan dari tahun ke tahun sesuai dengan fasilitas yang di sediakan. Berikut adalah gambar tabel kunjungan wisata di kabupaten kepulauan sula.

TABEL 5 JUMLAH KUNJUNG WISATAWAN KE KAWASAN WISATA KABUPATEN KEPULAUN SULA TAHUN 2010-2014

No	Tahun	Jumlah Wisatawan (jiwa)		Jumlah Jiwa	Pertambahan
		Domestik	Mancanegara		
1	2010	112	3	115	-
2	2011	94	-	94	-20
3	2012	42	-	42	-53
4	2013	86	3	89	47
5	2014	125	-	125	36
Jumlah		459	6	465	10

Sumber: Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015)

Dari data di atas di atas terlihat bahwa pengunjung atau wisatawan pada tahun 2010 dengan jumlah 115 jiwa dan pada tahun 2011 menurun menjadi 95 jiwa, pada tahun 2012 pengunjung atau wisatawan menurun lagi menjadi 42 jiwa. Akan tetapi pada tahun 2013 pengunjung atau wisatawan meningkat menjadi 89 jiwa, dan pada tahun 2014 pengunjung atau wisatawan bertambah meningkat menjadi 125 jiwa.

Analisis kelayakan finansial dilakukan terhadap obyek wisata yang ada di beberapa wilayah pembangunan kawasan khusus pariwisata itu sendiri, serta masih berada pada satu kawasan ekowisata. Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dari segi finansial untuk kemudian bisa dijadikan dasar dalam mengambil keputusan investasi, dan dari hasil analisis ini pula akan dapat diketahui bahwa pembangunan obyek kawasan wisata yang di bangun.

Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Kawasan khusus Pariwisata **517**

Dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan khusus Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula, ada beberapa faktor yang harus di sesuaikan dengan program yang akan di jalankan, sesuai dengan Visi dan misi yang di rumuskan dalam kebijakan tersebut. Pelaksanaan Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula juga ditentukan bagaimana penerimaan masyarakat yang ditunjukkan dengan suatu sikap responsif terhadap kebijakan tersebut. Kondisi lingkungan sosial Kabupaten Kepulauan Sula masih diwarnai dengan kentalnya budaya feodalistik yang membungkus sirkulasi kehidupan masyarakat. Imbasnya adalah hampir semua kebijakan di ranah publik didominasi oleh pihak pemerintah semata, termasuk kebijakan di bidang pariwisata. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula mengamini urusan kepariwisataan masuk dalam domain atau otoritas pemerintah daerah belaka. Kalaupun ada partisipasi dari masyarakat lokal, itu hanya menyentuh sisi luar saja. Porsi terbesar masih tetap digenggam oleh pihak pemerintah. Partisipasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula dalam aktivitas pariwisata masih rendah. Hal ini disebabkan karena tingkat pemahaman masyarakat tentang pariwisata yang masih sangat terbatas. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula yang rendah dan juga mayoritas masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula yang berkulat pada di bidang pertanian.

KOMUNIKASI

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula adalah yang merumuskan kebijakan dan di laksanakan oleh instansi yang bersangkutan secara lansung yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. sesuai dengan kebijakan tersebut.

Pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan khusus pariwisata yang di laksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

518 Kabupaten Kepulauan Sula sampai saat masih belum efektif di karenakan anggaran dan diskomunikasi yang terjadi. Namun langkah langkah yang di ambil oleh dinas kebudayaan dan Pariwisata dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan khusus pariwisata yaitu memabangun kominikasi dengan masyarakat di sekitaran kawasan wisata tersebut, di antaranya adalah sosialisasi di beberapa wilayah.

1. Sosialisasi dengan bentuk Penyuluhan
2. Komunikasi kepada lingkungan atau wilayah
3. Mekanisme pembangunan dan efek pembangunan
4. Pemberdayaan sumberdaya manusia dan sumber daya alam.

Empat poin di atas merupakan mekasinsme utama dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan khusus wisata. Namun ada beberapa kendalain yang terjadi di lapangan sehigga pembangunan pelaksanaan pembangunan tidak secara merata.

- a. Masalah finansial
- b. Diskomunikasi dan
- c. Sumberdaya manusia.

Analisis lebih jauh tentang tiga fakfor tersebut yaitu, masalah anggaran pembangunan kawasan wisata yang tidak jelas, selanjutnya Komunikasi yang di bangun dalam pelaksanaa kebijakan juga kurang efektif sehingga pembangunan kawasan tidak merata di wilayah atau kawasan wisata di kepulauan sula, kemudian pelaksanaan keijakan pembangunan juga terhambat pada sumberdaya manusia yang masih lemah, dari petugas Dinas Kebudayaan dan pariwisata dan beberapa Instansi yang lain. Sehingga keefektifan pembangunan kawasan khusus wisata tidak berjalan dengan baik.

DISPOSISI

Yang berperan dalam membangun kawasan khusus pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan bekerja sama dengan kontraktor swasta yang

berpatokan dengan RIPDA yang telah di sepakati bersama dan pelaksanaan pembangunan di kawal langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan fungsi dan kerja instansi tersebut.

Pembangunan kawasan wisata yang di bangun adalah kawasan wisata wisata pantai dan wisata alam bawah laut dan tingkat keberhasilan akan di lihat pada minat wisatawan terhadap kawasan wisata yang di bangun. Namun yang yang menjadi kendala adalah efisiensi anggaran pembangunan tidak tetap sehingga pembangunan kawasan wisata hanya berfokus pada beberapa wilayah yaitu.

1. Kinerja dari setiap instasi yang trkait secara langsung
2. Finansial (anggaran) yang tidak tetap terhadap pembangunan kawasan wisata.
3. Karakteristik birokrasi

STRUKTUR BIROKRASI

Sebagai industri perdagangan jasa, kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran Pemerintah baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu; perencanaan (*planning*) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (*development*) fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (*policy*) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (*regulation*). Struktur birokrasi adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula atau instansi yang terkait secara langsung yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pelaksanaan pembangunan kawasan khusus wisata yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kawasan khusus pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula selaku instansi daerah yang terkait langsung dengan pelaksanaan pembangunan kawasan khusus pariwisata, dan bekerja sama dengan Bapeda

- a. Struktur dan kompleksnya organisasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula yang menyebabkan rentang

kendali (*span of control*) menjadi susah.

- b. Adanya pembagian tugas di setiap unit dengan tingkat spesialisasi tertentu.
- c. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan khusus Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula tidak semata didominasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tetapi juga berkaitan dengan instansi-instansi lain seperti Dinas Pembangunan Daerah.

Selain kerjasama dengan lintas sektoral dalam instansi pemerintah yang ada, di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kerjasama dengan aktor atau institusi non-negara juga dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula. Namun hanya saja masih terkendala pada masalah komunikasi yang di akibatkan faktor politik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula sehingga pelaksanaan pembangunan masih sering terkendala.

SUMBERDAYA MANUSIA (SDM) DAN (SDA)

Dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan khusus pariwisata sumberdaya sangat di perlukan pada titik ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula atau instansi yang terkait dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah meliahat secara lansung potensi SDM ataupun SDA yang ada, namun ada beberapa kendala yang di temukan dalam melaksanakan kebijakan kawasan khusus pariwisata.

1. Minimnya tenaga kerja yang berpengalaman.
2. Sumberdaya manusia dari tingkat pendidikan.
3. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pariwisata terhadap kawasan tersebut.

Faktor faktor yang mempengaruhi pembangunan adalah SDM yang masih kurang sehingga pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula harus bersih keras bahwa harus ada kerja sama atau kunjungan pada wilayah lain sehingga pada wilayah tersebut dapat di jadikan contoh dalam membangun daerah dalam sektor pariwisata, apabila sumberdaya manusia mampu untuk melestarikan lingkungan dan

melihat seberapa besar potensi yang ada maka akan berefek pada tingkat pembangunan yang akan di laksanakan. **521**

Dari hasil analisis di atas dapat dilihat secara langsung di lihat bahwa faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan khusus yaitu dilihat dari faktor Komunikasi Disposisi, Struktur Birokrasi, Keuangan Daerah, dan Sumberdaya SDM, SDA. sehingga pelaksanaan kebijakan maupun rencana pembangunan belum dapat berjalan sesuai dengan Visi dan Misi pembangunan kawasan khusus pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan hasil wawancara pada bab-bab tersebut dapat di simpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kebijakan pemangunan kawasan khusus pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula, masih dalam tahap pembangunan dan ada beberapa wilyah yang baru di jadikan sebagai kawasan wisata dan kawasan khusus pariwisata tetapi tingkat pelaksanaannya belum mencapai target atau atau kesesuaian, yang menjadi tolak ukur dalam menentukan paramemeter yang peneliti gunakan. Hal ini dapat di lihat dari fakta barikut:
 - a. Tingkat pembangunan yang belum efektif di sektor pariwisata
 - b. Pelaksanaan kebijakan pembangunan yang masih dalam tahapan dan pemerintah daerah kurang memperhatikan wilyah wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang bisa di fungsikan.
2. Dari data hasil analisis yang ada, factor-factor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sula dengan bab - bab telah di bahas sebeleumya sesuai dengan pembangunan daerah yang masih belum efektif dan beberapa kendala yang di lihat pada tahapan pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan khusus pariwisata

- a. Pembangunan Daerah dan kawasan khusus wilayah pariwisata belum efektif untuk pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan masih di bawah rata-rata 20% dari hasil analisis lapangan.
- b. Permasalahan ekonomi dan anggaran yang tidak sesuai dengan dengan perencanaan pembangunan yang akan di laksanakan di Kabupaten Kepulauan Sula
- c. Tingkat sumberdaya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan khusus pariwisata masih kurang dan perlu untuk di kembangkan sesuai dengan yang di butuhkan dalam pembangunan Daerah kedepannya
- d. Pemberdayaan lingkungan yang masih kurang baik dengan potensi sumberdaya alam yang ada, sehingga wilayah atau kawasan yang bisa di manfaatkan atau di jadikan sebagai wilayah wisata tidak di berdayakan dengan sefektif mungkin.
- e. Ego sektoral yang masih sangat kuat, sehingga koordinasi dan komunikasi tidak berjalan efektif.

Dari kesimpulan yang telah di taik di ambil diatas maka penulis merekomendasikan beberapa saran yang harus di tambah dalam pembangunan awasan khusus pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula

- a. Perlu adanya penambahan bantuan dalam program pembagunan kawasan khusus pariwisata di kabupaten kepuauan sula.
- b. Perlu upaya untuk meningkatkan SDM yang ada melalui pendidikan. sosialisasi pelatihan pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas SDM.
- c. perlu adanya hubungan komunikasi yang efektif antara lembaga atau intansi terkait yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula agar arahan pembangunan kedepanyan lebih baik.
- d. Perlu adanya pemahaman terhadap masyarakat bahwa pentingnya

pembangunan kawasan khusus pariwisata kedepannya.

523

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Wijaya, H, A, W. 2011. *Otonomi dan Daerah Otonom*. Edisi 1-6. Jakarta Rajawali Pers
- Iwan Nograho dan Rokhimin Dahuri 2012. *Pembangunan Wilayah. Prespektif Ekonomi, sosial dan lingkungan* Edisi Revisi, Cet 2. Jakarta: LP3ES.
- Imam Harjanto 2011. *Teori Pembangunan*. Cet 1 Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Soetomo. 2013. *Strategi strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno. 2013. *Dasar dasar kebijakan Publik, kajian Proses dan analisis kebijakan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- William N. Dunn, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi 2. Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- Nyoman S. Pendit 2002. *Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar perdana*. Cet 7. Edisi terbaru. Jakarta: Pustaka Paramita.
- Moleong J Lexy, 2014 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Budi Winarno, MA, Phd 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses Dan Studi kasus)* PT Buku Seru
- Rian Nugroho, 2014 *Public Policy* PT Alex Media Komputindo
- Wolfgang Scahs dan Sritua, 1995 *Arief Kritik Atas Pembangunanisme* PT CPSM Jakarta
- Riant Nugroho, 2013 *Change Management Untuk Birokrasi* Pt Elex Media Komputindo Jakarta
- Iwan Taufiq Ritonga, 2009 *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah* PT Sekolah Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.

ARTIKEL/JURNAL

- Richard. A. de FRETES, Purnomo. B. santoso, Rudy Soenoko, dan Murty Astuti. 2013. *Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Industri Pariwisata Dengan Menggunakan Metode Swot Dan Qspm (Studi Kasus Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon)*. Vol. 4, No. 2 Tahun 2013: 109-118
- Tri Rizkal Warang1, Dwigth M. Rondonuwu ST, MT, Fella Warouw ST, M. Eng, Ph.D. 2013 *Pengembangan Wisata Pantai di Pulau Sulabesi Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara* Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mayun Nadiasa, D. N. K. Widnyana Maya, dan I N. Norken. *Analisis Investasi Pengembangan Potensi Pariwisata Pada pembangunan waduk jehem di kabupaten bangle* Vol. 14, No. 2, Juli 2010

TESIS

- Kartini La Ode Unga. 2011 Tesis. *Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Kepulauan Banda* Fakultas Teknik Perencanaan dan Pembangunan Wilayah Universitas Hasanudin Makassar

- Lubis, Rudi Faisal. 2009. *Pelaksanaan kebijakan pemda dalam upaya meningkatkan pariwisata kota Parapat, kecamatan Girsang Sipanganbolon, kabupaten Simalungun, propinsi Sumatera Utara* Universitas Indonesia.
- Timang Setyorini. 2004. *kebijakan pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat kabupaten semarang* Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Asri Dwi Asmarani. 2010. *Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten* Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Ikshan Facry Kemhay, 2013 *fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten kepulauan sula provinsi maluku utara*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jogjakarta.

WEB.

- (http://wikimedia..commons/tesis_strategi_pembangunan_kawasan_wisata_kepulauan_banda.pdf)
- <Http://Www.Jdih.Kemendagri>
- Dokumen
- Data Tata Ruang Kabupapen Kepulauan Sula. (KAK) *Kerangka Acuan Kerja 2014 Profil kabupaten kepulauan Sula 2014* No Publikasi: 8203.1406. BPS Kabupaten Kepulauan
- Sula Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sula 2013*. Naskah Tim Statistik BPS Kabupaten Kepulauan Sula